



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta No.59 ☎ (0293) 788181 Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 Kode Pos 56511 www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 27 Desember 2017

Nomor : 700/5467/03/2017

Lampiran : -

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja SKPD
Tahun 2017

Kepada

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI
di

JAKARTA

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/KEP/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Magelang Nomor : 094/172/03/2017 tanggal 29 Agustus 2017. Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Magelang telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh Informasi tentang Implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c. Memberikan saran perbaikan guna peningkatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2015 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran nilai dari 0 s.d 100. SKPD yang dievaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Magelang Tahun 2016 sebanyak 24 (dua puluh empat) SKPD sebagai sampel dan hasil evaluasi sebagai berikut:

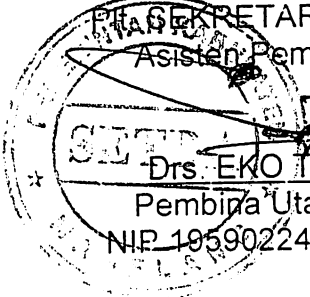
No	SKPD	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja	Capaian Kinerja	Total	Kriteria
1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	20,04	17,50	10,42	5,08	7,85	60,89	B
2	DINAS PERHUBUNGAN	17,21	13,75	12,58	5,00	14,58	63,12	B
3	DISPARPORA	19,10	13,44	10,07	4,05	15,79	62,44	B
4	DPMPTSP	16,93	15,31	9,62	4,50	10,83	57,19	CC
5	DISPTERIKAN	21,29	15,00	6,80	4,09	13,06	60,23	B
6	BKPPD	15,54	13,13	12,81	6,48	9,69	57,65	CC
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20,11	13,13	10,42	5,62	6,95	56,22	CC
8	KESBANGPOL	18,34	12,50	9,80	5,73	7,56	53,94	CC
9	DISKOMINFO	21,93	13,44	10,15	6,48	10,54	52,00	CC
10	SETWAN	19,83	17,81	10,42	5,49	10,22	63,77	B
11	RSUD MUNTILAN	17,12	8,75	13,56	6,64	16,58	62,65	B
12	BPPKAD	21,76	20,00	14,78	7,98	7,25	71,76	BB
13	SATPOL dan PENANGGULANGAN KEBAKARAN	18,39	8,44	9,35	4,12	7,50	49,05	C
14	KECAMATAN BANDONGAN	21,60	11,88	9,18	3,17	14,75	60,57	B
15	KECAMATAN SECANG	22,03	12,19	6,79	4,50	15,06	60,56	CC
16	KECAMATAN MUNGKID	24,78	13,13	6,98	5,08	14,06	64,02	B
17	KECAMATAN SALAMAN	18,24	11,26	8,15	3,13	15,84	56,62	CC
18	KECAMATAN MERTOYUDAN	16,70	13,44	7,95	5,58	6,46	50,12	CC
19	KECAMATAN BOROBUDUR	10,82	15,94	1,00	1,00	18,00	54,63	CC
20	KECAMATAN CANDIMULYO	11,69	15,63	9,54	6,29	13,06	60,33	B
21	KECAMATAN TEMPURAN	9,24	9,69	7,73	4,25	8,93	39,83	C
22	KECAMATAN SALAM	27,60	9,69	8,48	3,13	11,08	59,97	CC
23	KECAMATAN NGLUWAR	20,39	12,81	7,26	0,71	14,83	56,00	CC
24	KECAMATAN MUNTILAN	10,27	14,38	12,03	4,71	15,63	57,01	CC

Keterangan: C = Kurang
C = Cukup Memadai

B = Baik
BB = Sangat Baik

4. Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD masih dijumpai kelemahan/kekurangan, antara lain:
- Sasaran dalam Renstra agar berorientasi hasil dengan indikator tujuan yang SMART dan selaras dengan RPJMD
 - Mekanisme pengumpulan data kinerja belum tersusun dan agar dikembangkan dengan teknologi informasi
 - Rencana aksi atas kinerja belum dievaluasi dan dimonitor pencapaian kerjanya secara berkala baik secara bulanan/ triwulan/ semester
 - Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi dan belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
 - Sebagian SKPD belum mempublikasikan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja dalam website SKPD.
 - Hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen dan kinerja

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD Tahun 2017 dan untuk menjadikan periksa.

a.n. BUPATI MAGELANG
PLA SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan

Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 195902241984031005

Tembusan.:
Bupati Magelang



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/415/AA.05/2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017**

5 Februari 2018

Yth. **Bupati Magelang**
di
Mungkid

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah atas nama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2017. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ditujukan untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.**

Hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat nilai **58.82** atau dengan predikat penilaian "CC". Hasil evaluasi secara rinci, dapat dilihat pada Laporan Hasil Evaluasi yang disampaikan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik pada tingkat Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan agar menjadi perhatian dan harus segera ditindak lanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,

Muhammad Yusuf Ateh

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri; dan
3. Gubernur Jawa Tengah.

607



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181
Fax (0293) 788122 Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS DAERAH:

Tebar Organisasi

diagendakan ap-
pet oleh SKPD &
melalui revisi oleh
SKPD SKPD.

13/8
3



BUPATI MAGELANG 600.66 12/3-10

LEMBAR DISPOSISI BUPATI MAGELANG

Surat dari : INSPEKTORAT PROVINSI JATENG
 Nomor Surat : 710/808/1.1/2018 Diterima Tgl. :
 Tanggal Surat : 8 Maret 2018 No. Agenda : 458
 Perihal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
 Instansi Pemerintah Th. 2017

Disposisi untuk :

- | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| 1. SEKDA | <input type="checkbox"/> | Amat Segera | <input type="checkbox"/> | Segera | <input type="checkbox"/> | Biasa |
| 2. BAGIAN | | | | | | |
| 3. DINAS | | <input type="checkbox"/> | Rahasia | <input type="checkbox"/> | Bukan Rahasia | |
| 4. BADAN | | | | | | |
| 5. KANTOR | | | | | | |

DISPOSISI :

Yth. P. Seledu

- Lakukan Upaya peningkatan Kinerja

12
3



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda 127-133 Telp. 3517283-3517284-3556230 Fax. 3514351
SEMARANG 50132

email : inspektorat@jatengprov.go.id website : <http://inspektorat.jatengprov.go.id>

Nomor : Semarang, 11 Desember 2017
Sifat : -
Lamp. : - Kepada
Perihal : Hasil Evaluasi atas Yth. Bupati Magelang
Akuntabilitas Kinerja Instansi di -
Pemerintah Tahun 2017 **M U N G K I D**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Magelang dan hasilnya telah diverifikasi oleh Kementerian PAN dan RB-RI. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang memperoleh **nilai 58,82 atau predikat "CC"**. Penilaian tersebut menunjukkan **Pemerintah Kabupaten Magelang telah membangun sistem manajemen akuntabilitas kinerja dengan cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban dan perlu banyak perbaikan namun tidak mendasar.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,07
2.	Pengukuran Kinerja	25	12,14
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,17
4.	Evaluasi Internal	10	4,63
5.	Capaian Kinerja	20	11,81
Nilai Hasil Evaluasi		100	58,82
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC

Uraian selengkapnya secara singkat atas hasil evaluasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja
 - a.1. Dokumen Perencanaan Strategis (RPJMD) dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang belum dipublikasikan;
 - a.2. Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) OPD belum sepenuhnya memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik;
 - a.3. Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) OPD belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
 - a.4. Target kinerja OPD belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik;
 - a.5. Program/kegiatan yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah dan OPD belum semuanya merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan;
 - a.6. Dokumen RPJMD/Renstra Pemerintah Kabupaten Magelang dan Renstra OPD belum sepenuhnya selaras dengan Dokumen RPJMN/RPJMD, belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan, belum sepenuhnya sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan, belum direviu secara berkala dan target jangka menengah dalam RPJMD/Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
 - a.7. Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) / Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) dan target kinerja pada OPD belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
 - a.8. Penetapan Kinerja OPD belum seluruhnya menyajikan IKU dan selaras dengan RPJMD/Renstra, serta belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi);
 - a.9. Rencana Aksi atas Kinerja OPD belum sepenuhnya mencantumkan target secara periodik atas kinerja;
 - a.10. Rencana kinerja tahunan pada OPD belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
 - a.11. Target kinerja yang diperjanjikan pada pemerintah Daerah dan OPD belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan;
 - a.12. Rencana Aksi atas Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala, dan dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
 - a.13. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah dan OPD belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

b. Pengukuran Kinerja

- b.1. IKU Pemerintah Daerah belum dipublikasikan;
- b.2. Belum semua OPD terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya;
- b.3. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memadai sehingga pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan;
- b.4. Pada OPD belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu;
- b.5. IKU Pemerintah Kabupaten Magelang dan OPD belum direviu secara berkala, belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai, dan belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, serta belum sepenuhnya cukup untuk mengukur kinerja;
- b.6. IKU unit kerja (OPD) belum seluruhnya selaras dengan IKU IP dan belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator yang baik;
- b.7. Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV OPD belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, dan Indikator kinerja eselon III dan IV OPD belum seluruhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya;
- b.8. Ukuran (indikator) kinerja individu OPD belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya dan pengukurannya belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang;
- b.9. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi OPD belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester);
- b.10. Target kinerja eselon III dan IV OPD belum dimonitor pencapaiannya secara berkala;
- b.11. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas OPD belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
- b.12. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi OPD belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;

c. Pelaporan Kinerja

- c.1. Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome;
- c.2. Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan;
- c.3. Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja;
- c.4. Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya

- c.5. Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan target jangka menengah, standar nasional atau RPJMN, capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas;
 - c.6. Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
 - c.7. Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
 - c.8. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja OPD belum sepenuhnya dapat diandalkan;
 - c.9. Informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang dan OPD belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja maupun untuk penilaian kinerja.
- d. Evaluasi Internal
- d.1. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya dilakukan;
 - d.2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten, belum sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi dan belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - d.3. Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - d.4. Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan secara berkala, belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
 - d.5. Hasil evaluasi rencana aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode;
 - d.6. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, pemberian reward and punishment;

- d.7. Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang;
- d.8. Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Bupati Magelang untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

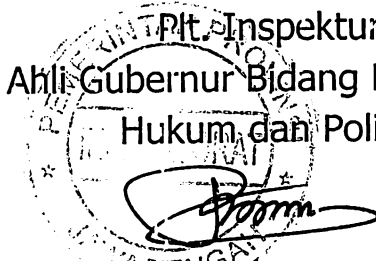
- a. Mempublikasikan Dokumen Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Magelang (RPJMD), Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Utama (IKU) agar dapat diakses dengan mudah setiap saat melalui website resmi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau media lain yang memudahkan publik untuk mengakses;
- b. Melakukan reviu dan perbaikan penetapan indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan input) sesuai kriteria indikator yang baik dan menetapkan target kinerja dengan baik terhadap dokumen-dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD/Renstra) untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKT/Peranjan Kinerja/RKPD/Renja/RKA) yang berbasis kinerja dan berorientasi hasil menggunakan metode *Cascading* ;
- c. Melakukan reviu dan perbaikan terhadap penetapan IKU sesuai kriteria indikator yang baik dan selaras antara eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
- d. Memanfaatkan dokumen IKU dan Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan sebagai alat untuk menilai, mengendalikan dan memantau kinerja OPD serta digunakan sebagai pertimbangan pemberian reward dan punishment.
- e. Memanfaatkan dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang dan Laporan Kinerja OPD untuk digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan peningkatan kinerja maupun untuk penilaian kinerja
- f. Melaksanakan pemantauan rencana aksi secara berkala, memberikan alternatif perbaikan dan hasil evaluasi dapat menunjukkan setiap periode dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah – langka nyata;
- g. Menindaklanjuti Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan perencanaan, perbaikan penerapan manajemen kinerja, dan pemberian reward and punishment;
- h. Menindaklanjuti Hasil evaluasi program untuk perbaikan pelaksanaan dimasa yang akan datang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas AKIP Kabupaten Magelang. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

a.n. GUBERNUR PROVINSI JAWATENGAH

Plt. Inspektur
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik



SISWO LAKSONO, SH, M.Kn

Pembina Utama Madya

NIP. 19581009 198503 1 013

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri PAN dan RB di Jakarta;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Bapak Plt. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Arsip. _____